

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

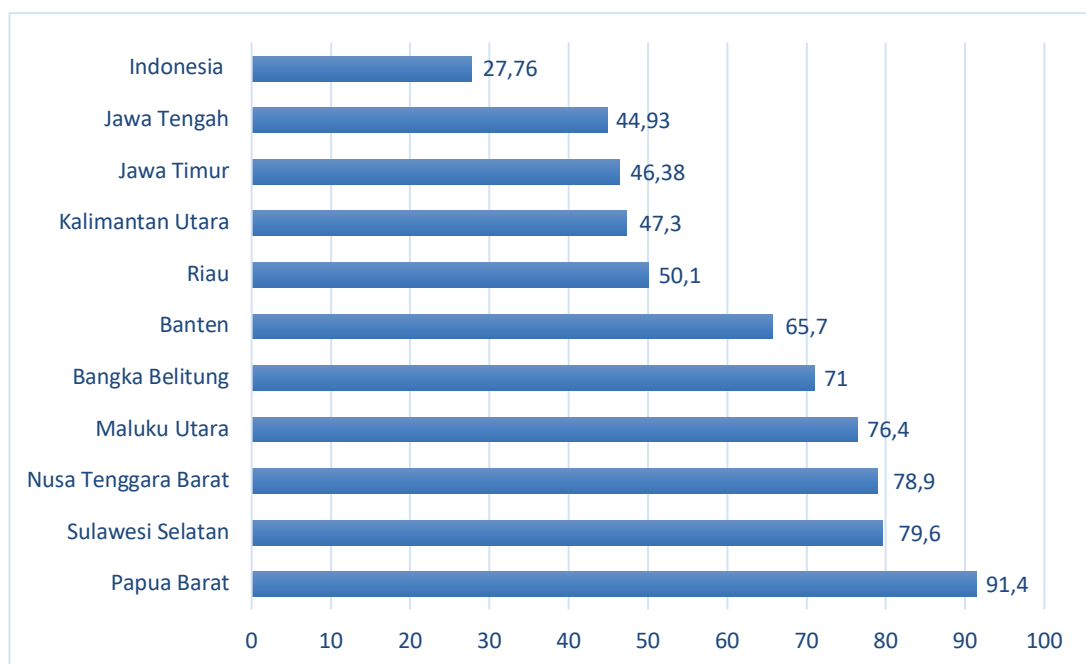
Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan standar hidup suatu negara melalui proses transformasi atau perubahan yang terencana, mantap, dan berkelanjutan. Pembangunan adalah proses untuk membuat sesuatu yang tadinya tidak terlalu baik menjadi lebih baik. Sementara itu, pembangunan nasional melibatkan sejumlah proses bagi seluruh sistem administrasi negara untuk dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan nasional, serta upaya untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Slagian, 1994).

Simatupang dan Saktyanu (2003) menyatakan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memperhatikan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Menurunkan tingkat kemiskinan merupakan salah satu tujuan dan pencapaian pembangunan nasional. Kemampuan untuk menurunkan angka kemiskinan merupakan pertimbangan utama dalam memilih alat atau inisiatif pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan ketika memilih sektor inti pembangunan nasional.

Kemiskinan adalah kondisi universal yang mempengaruhi hampir semua kelompok bangsa. Selain menyebar ke seluruh sistem diberbagai negara, kemiskinan kini mengancam negara-negara kaya dan berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masalah dan tantangan kemiskinan yang telah lama menjadi keprihatinan utama yang dirasakan oleh masyarakatnya. Jumlah penduduk dan pertumbuhan yang tidak merata menyebabkan meningkatnya pula pengangguran baik di pedesaan maupun diperkotaan sehingga mengurangi prospek pekerjaan. Pembangunan juga sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM), namun menurut statistik BPS tahun 2021, pendapatan SDM di Indonesia masih relatif rendah yaitu 18,30 persen, dibandingkan dengan rata-rata 20,01 persen selama sepuluh tahun sebelumnya. Rendahnya tingkat pendidikan dan masalah lainnya dapat

berkontribusi pada rendahnya kualitas SDM Indonesia, karena masalah kemiskinan di negara ini belum sepenuhnya diberantas dan diperbaiki.

Kuncoro (2011) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, termasuk makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Masalah standar hidup yang rendah terkait dengan pendapatan yang rendah, layanan kesehatan dan medis yang tidak memadai, dan pencapaian pendidikan yang rendah, yang semuanya berdampak pada sumber daya manusia yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Situasi kemiskinan mencakup berbagai karakteristik yang saling terkait dan secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: pendapatan tetap yang tidak mencukupi, aset produktif, dan aksesibilitas terhadap jaring pengaman sosial. Ketersediaan fasilitas yang minim, termasuk air bersih, fasilitas sanitasi, layanan kesehatan, dan pendidikan. Persentase penduduk miskin tiap provinsi di Indonesia dapat dilihat melalui tabel berikut:

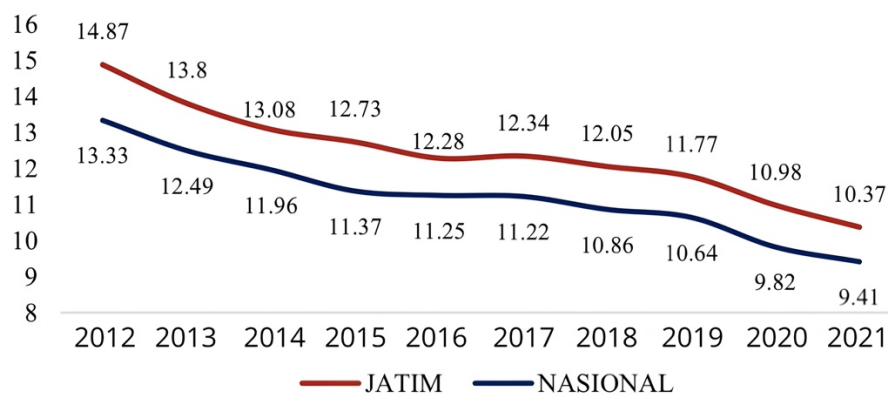


Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Tiap Provinsi di Indonesia 10 Terbesar Tahun 2021 (persen)

Sumber : BPS, 2021 (data diolah)

Gambar 1.1 menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke Sembilan dengan persentase penduduk miskin sebesar 46,38 persen, disusul dengan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 47,03 persen dan Provinsi Papua

Barat dengan jumlah tertinggi yaitu 91,4 persen. Meskipun Provinsi Jawa Timur tidaklah termasuk Provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia, namun jumlah yang diperoleh Provinsi Jawa Timur masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah penduduk miskin tingkat nasional, yaitu 27,76 persen. Jawa timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi di pulau jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Dari data BPS tercatat rata-rata presentase penduduk miskin di Jawa Timur pada tahun 2012-2021 terlihat pada Gambar 1.2



Gambar 1.2 Perbandingan Presentase Kemiskinan di Jawa Timur dan Nasional (persen)

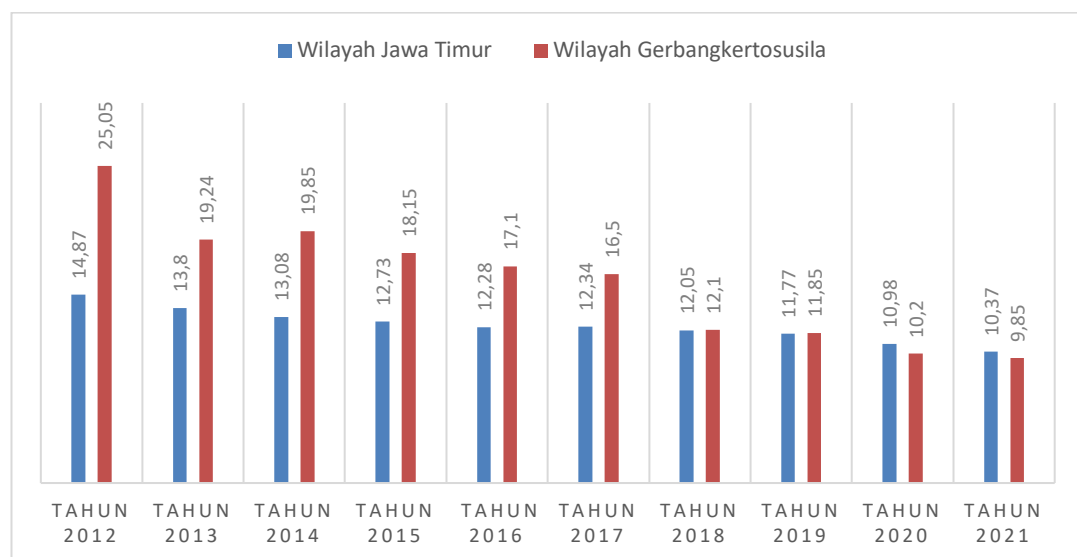
Sumber : BPS Jawa Timur, 2021

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Jawa Timur cenderung berada diatas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Hal ini menandakan bahwa pembangunan yang ada, belum menjangkau keberadaan seluruh penduduk miskin di Jawa Timur. Meskipun kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan tren negatif, akan tetapi menurut penelitian wongdeswati (2009) yang berjudul “pengaruh kemiskinan terhadap keberlangsungan hidup di Provinsi Jawa Timur” menyebutkan adanya penurunan kemiskinan. Hal tersebut masih belum bisa dikatakan signifikan. Masalah kemiskinan di Jawa Timur menjadi sangat krusial, khususnya dengan hadirnya beberapa daerah yang menyumbang tingginya angka kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur dan PP No. 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional untuk mengatasi masalah kemiskinan di provinsi

tersebut. Peraturan-peraturan tersebut menetapkan Wilayah Kerja Sama (WK) yang dikelompokkan ke dalam sembilan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). SWP I Gerbangkertosusila, salah satu wilayah pengembangan di Jawa Timur, terdiri dari tujuh kabupaten/kota: Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan.

Setelah Jabodetabek, kawasan Gerbangkertosusila merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek. Lebih lanjut, Kawasan Gerbangkertosusila di Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis nasional untuk kepentingan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional. Penetapan ini didasarkan pada fungsi kawasan dan elemen-elemen ekonomi yang dipercaya sebagai pendorong utama pembangunan wilayah nasional dalam hal pertumbuhan, pemerataan, dan integrasi. Dengan demikian, diharapkan kawasan yang memiliki nilai strategis nasional ini dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila dapat dilihat dalam gambar 1.3



Gambar 1.3 Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan di Wilayah Gerbangkertosusila 2012-2021 (persen)

Sumber: BPS Jawa Timur, 2021

Gambar 1.3 menyatakan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di

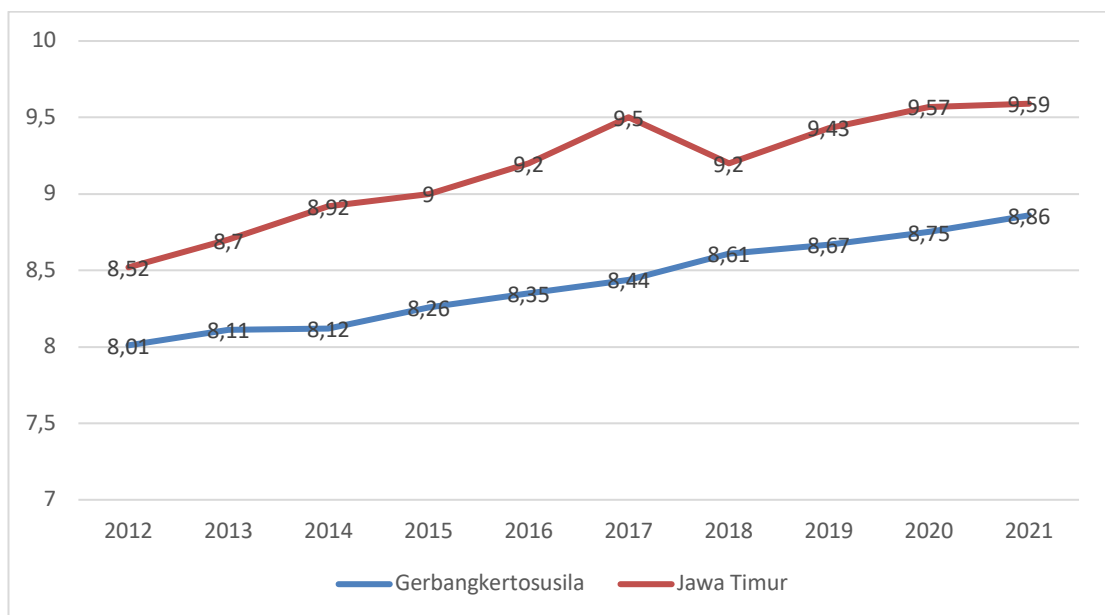
Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2012-2021 meskipun data yang ditunjukkan wilayah Gerbangkertosusila semakin tahun semakin menurun dengan jumlah 25,05 persen di tahun 2012 dan menurun drastis hingga 9,85 persen di tahun 2021 namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan wilayah Gerbangkertosusila masih sangat tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang memperoleh jumlah 14,87 persen di tahun 2012 dan 10,37 persen di tahun 2021. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi dari pembentukan Gerbangkertosusila sebagai pengembangan kegiatan industri dan sumberdaya, pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, energi, dan pembangunan wilayah lainnya yang tertulis dalam peraturan pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pembangunan merupakan persyaratan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Todaro berpendapat bahwa indikator pembangunan terdiri dari tiga dasar, yaitu pendapatan riil, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan pemikiran dari Todaro & Smith, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi kemiskinan diperlukan kondisi kecukupan yang merupakan nilai inti dari pembangunan dan salah satu indikator dari pembangunan adalah pendidikan.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap masalah sosial ekonomi suatu negara adalah kualitas penduduknya yang buruk. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman tenaga kerja dapat menjadi akar penyebab rendahnya kualitas penduduk. Menurut Prastyo (2010), pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang terlihat dari peningkatan pengetahuan dan keahlian seseorang. Pengetahuan dan kemampuan seseorang akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendidikan, yang akan meningkatkan produktivitas mereka dalam bekerja.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Todaro (2003) menjelaskan bahwa penerapan tolak ukur pembangunan yang murni bersifat ekonomis, agar lebih akurat dan bermanfaat, harus didukung oleh indikator-indikator sosial (*social*

indicators) nonekonomis. Contoh indikator sosial itu antara lain adalah tingkat rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, laju pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Sebagai suatu konsep, indikator pendidikan merupakan besaran kuantitatif mengenai suatu konsep tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur proses hasil pendidikan atau dampak terhadap kebijakan pendidikan. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinarta (2023) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan kemiskinan daerah. Rata-rata lama sekolah di wilayah Gerbangkertosusila dapat dilihat pada gambar 1.4



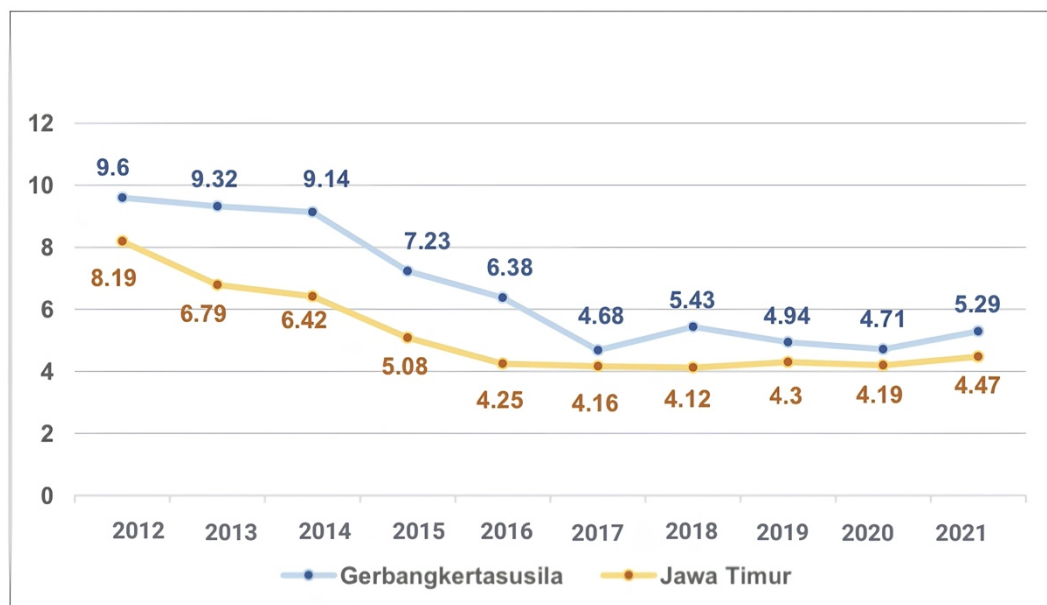
Gambar 1.4 Rata-rata Lama Sekolah di Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2012-2021

Sumber : BPS Jawa Timur, 2021

Gambar 1.4 menunjukkan rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota untuk penduduk usia 15 tahun ke atas di Kawasan Gerbangkertosusila pada tahun 2012-2021 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Terlihat bahwa pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah sejumlah 8,10 persen dan mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen hingga tahun 2021 sejumlah 8,86 persen. Persentase wilayah Gerbangkertosusila yang meningkat masih belum mampu mengimbangi presentase rata-rata lama sekolah di provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 Jawa Timur mendapatkan angka sebesar 9,59, hal tersebut sangatlah jauh jika dibandingkan dengan wilayah Gerbangkertosusila yang

mendapatkan angka 8,86 pada tahun 2021. Menurut teori lingkaran setan kemiskinan atau *Vicious Circle Of Poverty* kemiskinan yaitu hubungan kualitas sumber daya yang saling mempengaruhi, sumber daya manusia yang baik ialah orang-orang yang memiliki pendidikan yang baik pula. Hal tersebut akan otomatis berpengaruh pada penurunan kemiskinan.

Pengangguran adalah elemen lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Masalah pengangguran di negara-negara berkembang memiliki banyak aspek. Kemiskinan dan pengangguran adalah masalah yang saling terkait erat. Kemiskinan akan meningkat seiring dengan tingginya tingkat pengangguran, dan sebaliknya. Pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan seseorang akan terkena dampak negatif dari tingkat pengangguran yang tinggi. Megawati (2017) berpendapat bahwa terdapat korelasi yang substansial dan positif antara kemiskinan dan tingkat pengangguran. Terjebak dalam siklus kemiskinan lebih mungkin terjadi ketika pengangguran mengurangi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengangguran yang tinggi memiliki dampak jangka panjang yang merugikan terhadap keresahan sosial dan politik, serta kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi suatu negara (Sukirno, 2019).



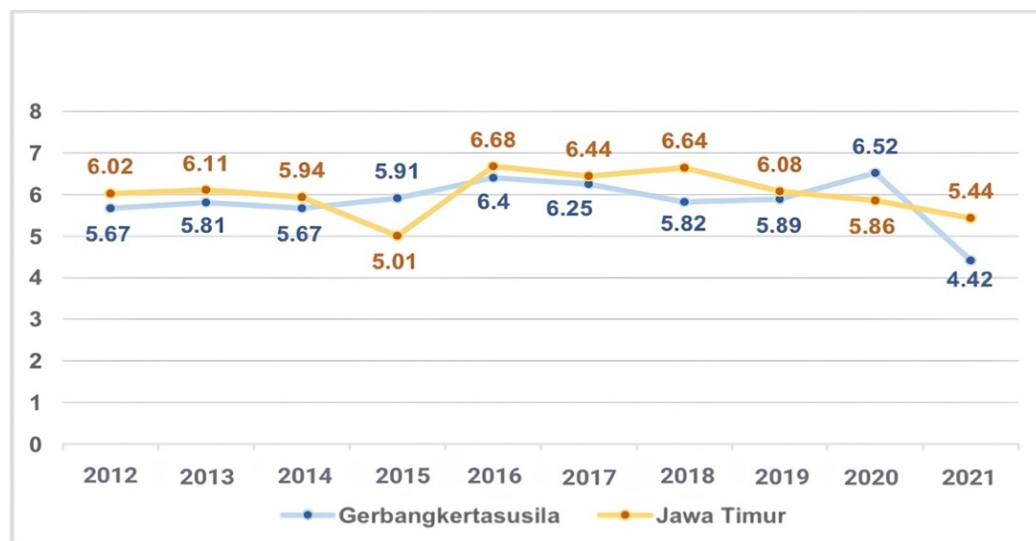
Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2012-2021

Sumber : BPS Jawa Timur, 2021

Pada Gambar 1.5 menunjukkan Tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertosusila selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2012-

2021 masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbangkertosusila juga lebih banyak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang cenderung stabil. Tingkat pengangguran terbuka di Gerbangkertosusila bergerak fluktuatif dari tahun 2012-2021. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka sebesar 9.60%, lalu turun pada 5 (lima) tahun. Selanjutnya dimana pada tahun 2017 tingkat pengangguran sebesar 4.68%. Selanjutnya dimana pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 5.43% dan kembali turun pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 4.49% dan 4.71%. Namun di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi 5.29%

Wongdesmiwati (2009) menyatakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pendapatan nasional yang tinggi sangat penting bagi proses pembangunan. Bagi banyak negara, mengurangi kemiskinan terutama berarti mencapai pertumbuhan ekonomi yang tepat. Pertumbuhan ekonomi saja tidak akan mengakhiri kemiskinan; tetapi, biasanya pertumbuhan ekonomi diperlukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan jika tidak disertai dengan pemerataan pendapatan..

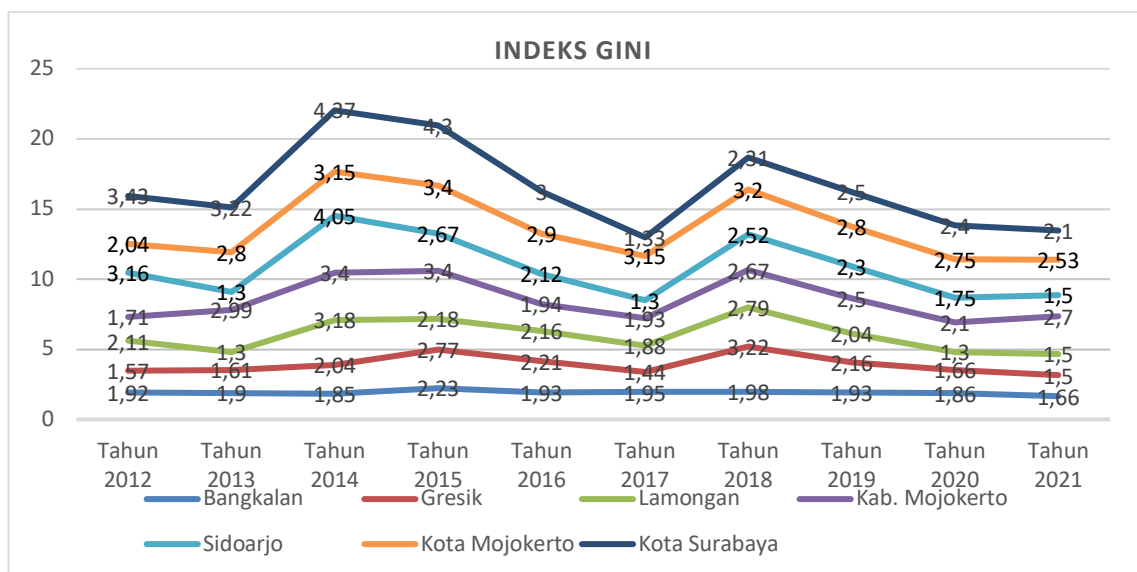


Gambar 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2012-2021

Sumber: BPS Jawa Timur, 2021

Gambar 1.6 menjelaskan laju pertumbuhan kawasan Gerbangkertosusila masih lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur antara tahun 2012 dan 2021, laju pertumbuhan ekonomi di Jawa

Timur dan Gerbangkertosusila bervariasi. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sebesar 6,02% pada tahun 2012, 6,11% pada tahun 2013, turun pada tahun 2014 dan 2015, naik pada tahun 2016 sebesar 6,68%, turun 6,44% pada tahun 2017, naik 6,64% pada tahun 2018, dan mengalami penurunan pada 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Sementara itu, tingkat pertumbuhan ekonomi Gerbangkertosusila naik dari 5,67% menjadi 5,81% antara tahun 2012 dan 2013, kemudian turun di tahun 2014 sebelum naik lagi dua tahun kemudian. Namun, angka tersebut turun lagi antara tahun 2017 dan 2018, naik 6,25% dan 5,82% pada tahun 2019 dan 2020 sebelum turun 4,42% pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan Danang (2018) menyatakan bahwa berpengaruh positif dan juga signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Ketimpangan distribusi pendapatan bisa terjadi di berbagai provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1.7 Gini Ratio Kabupaten/Kota di wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2012-2021 (satuan)

Sumber : BPS Jawa Timur, 2022

Gambar 1.7 menjelaskan angka Gini ratio setiap kabupaten/kota yang berada di wilayah Gerbangkertosusila pada Tahun 2012-2021 memiliki angka yang fluktuatif setiap kabupaten/kotanya. Kota Surabaya sebagai kabupaten/kota di wilayah Gerbangkertosusila yang mempunyai angka sangat fluktuatif, pada

tahun 2013 Kota Surabaya berhasil menurunkan angka indeks gini di angka 3,22 namun di tahun berikutnya yaitu tahun 2014 justru meningkat sampai 4,37 persen, tidak cukup sampai disitu saja, di tahun 2015 hingga 2021 Kota Surabaya masih terus naik turun dan berakhir pada angka 2,1 persen. Hal itu berbanding terbalik dengan kabupaten Bangkalan yang terlihat cukup stabil dari tahun 2012 hingga tahun 2021 rata-rata perubahan angka di kabupaten Bangkalan hanya 0,2 persen dan berakhir pada angka 1,66 persen di tahun 2021. Penelitian yang dilakukan Atmojo (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan juga signifikan pengaruh indeks gini terhadap kemiskinan. Ukuran untuk melihat terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan gini ratio mendekati angka nol maka menunjukkan kesetaraan sempurna atau rendahnya ketimpangan dan sebaliknya apabila gini ratio mendekati angka satu maka menunjukkan ketidaksetaraan atau adanya ketimpangan yang tinggi.

Todaro (2006) menyatakan ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Ketimpangan pendapatan juga memiliki dampak negatif yaitu adanya inefisiensi ekonomi, sosial dan solidaritas menjadi menurun. Selain itu, tingginya ketimpangan umumnya dipandang sebagai ketidakadilan. Munculnya masalah ketimpangan berasal dari distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Tingginya persentase fluktuatif indeks gini atau yang disebut juga ketimpangan pendapatan ini juga dapat menyebabkan masalah kemiskinan.

Kemiskinan adalah masalah sosial yang mempengaruhi seluruh negara dan menunjukkan perjuangan dan kejatuhan dalam kehidupan warganya. Kemiskinan bukan hanya masalah angka atau statistik. Kemiskinan adalah masalah yang rumit dan memiliki banyak sisi yang berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Aspek-aspek tersebut harus ditangani agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan kualitas hidup masyarakat dapat berkembang.

Latar belakang informasi di atas menunjukkan adanya tren penurunan tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Satuan Wilayah Pengembangan

(SWP) Gerbangkertosusila untuk tahun 2012-2021, meskipun masih jauh di atas tingkat yang diinginkan pemerintah. Mayoritas tingkat kemiskinan di Kota/Kabupaten di dalam SWP Gerbangkertosusila masih tinggi, dan tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila masih belum terdistribusi secara merata. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi kemiskinan, namun hasil yang tidak konsisten menunjukkan bahwa masalah ini masih terus berlanjut. Kemiskinan memiliki dampak yang sangat buruk bagi perekonomian suatu negara atau daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami variabel-variabel yang berkontribusi terhadap kemiskinan, khususnya di wilayah SWP Gerbangkertosusila, yang menjadi subjek penelitian. SWP ini merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur, setelah Jabodetabek, dan memiliki sektor manufaktur dan industri yang kuat.

Gerbangkertosusila adalah kawasan pusat perekonomian di wilayah Jawa Timur, Kawasan ini lebih unggul dari segala faktor jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur. Namun, persentase pendidikan, pengangguran, indeks gini, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Gerbangkertosusila masih di bawah rata-rata keseluruhan wilayah di Jawa Timur. Gerbangkertosusila yang merupakan salah satu kawasan yang berfokus pada industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur, seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang diserap haruslah tenaga kerja yang berkualitas, artinya berpendidikan. Kesesuaian upah minimum juga harus diperhatikan, karena akan berpengaruh pada kesejahteraan dan kebutuhan hidup tenaga kerja, yang akan menurunkan tingkat pengangguran yang ada saat ini dan juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut yang melatarbelakangi penulis dalam mengambil beberapa variabel penelitian dalam penelitian ini dan tertarik menyusun penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Indeks Gini, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan Di Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila Tahun 2012-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Gerbangkertosusila?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Gerbangkertosusila?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Indeks Gini Rasio terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Gerbangkertosusila
4. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Gerbangkertosusila

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Gerbangkertosusila.
2. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Gerbangkertosusila.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Indeks Gini Rasio terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Gerbangkertosusila
4. Menganalisis pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Gerbangkertosusila

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai tambahan kajian empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila.
 - b. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilaha Gerbangkertosusila.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, indeks gini dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila.